ABSTRAK

Setelah terjadinya disfungsi pada Appellate Body World Trade Organization (WTO), negara-negara anggota beralih ke mekanisme arbitrase sebagai upaya banding alternatif yang tercantum dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) dengan membentuk Multi-Party Interim Arbitration Agreement (MPIA). Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis apakah prosedur banding melalui MPIA serta kekuatan hukum dari putusan-putusan yang dihasilkannya sesuai dengan kerangka hukum yang disediakan oleh DSU. Meskipun rumusan Pasal 25 DSU tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada tahap banding, interpretasi pasal tersebut dengan pendekatan kontekstual berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Vienna Convention on the Law of Treaties menunjukkan bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk mendasari arbitrase sebagai mekanisme banding alternatif. Selain itu, DSU menjamin efektivitas putusan MPIA berdasarkan Pasal 25, sehingga sifat mengikatnya setara dengan putusan yang dikeluarkan oleh Panel maupun Appellate Body. Oleh karena itu, MPIA berfungsi sebagai solusi sementara yang sah dan mengikat secara hukum untuk menjaga integritas sistem penyelesaian sengketa dua tingkat WTO di tengah kelumpuhan institusional. Skripsi ini menyarankan reformasi terhadap DSU khususnya dalam mekanisme pengangkatan anggota Appellate Body, penguatan peran arbitrase melalui MPIA sebagai mekanisme permanen di bawah WTO, serta pembentukan kewenangan bagi WTO untuk mengeluarkan advisory opinion dalam situasi kekosongan hukum.

Kata Kunci: Pasal 25 DSU, Multi Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), Mekanisme Banding Alternatif, DS591: *Colombia – Frozen Fries*.

ABSTRACT

Following the dysfunctionality of the Appellate Body of the World Trade Organization (WTO), member States have turned to arbitration as an alternative appeal mechanism provided in the Dispute Settlement Understanding (DSU) by establishing a Multi-Party Interim Arbitration Agreement. This thesis uses a normative method of legal research to analyze whether or not the appeal procedure before the MPIA and the legal force of its decisions fit within the legal framework of the DSU. While the formulation of Article 25 of the DSU does not specify the use of arbitration as an alternative means of dispute settlement at the appellate stage, interpretation of the Article using the contextual approach provided in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties has proven that it may facilitate arbitration as an alternative appeal mechanism. Further, the DSU ensures the effectiveness of MPIA awards under Article 25, making their binding nature similar to the decisions issued by a Panel or the Appellate Body. Therefore, the MPIA serves as a legitimate and legally binding interim solution that preserves the integrity of the WTO's two-tier dispute settlement system amid institutional paralysis. This paper suggests the reformation of the DSU, especially in the appointment mechanism of Appellate Body members, strengthening arbitration through the MPIA as a permanent mechanism under the WTO, and allowing the WTO to issue advisory opinions during in the course of a legal limbo.

Keywords: Article 25 of the DSU, Multi Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), Alternative Appeal Mechanism, DS591: *Colombia – Frozen Fries*.